

Volume II No.2 Tahun 2022

Warta

PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN



Warta

Pusat Perpustakaan dan
Penyebaran Teknologi Pertanian

Redaksi

Warta Pustaka diterbitkan 4 kali dalam setahun oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA). Pengarah: Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian; Penanggung Jawab: Koordinator Kelompok Substansi Penyebaran Teknologi Pertanian; Ketua Dewan Redaksi: Vivit Wardah Rufaidah; Reporter: Sigit Sayogya, Suryono, Widaningsih, Shintawati Octaviani, Dhira Anindya N; Aji Widhi Wibowo; M. Zuhdi; Redaktur Pelaksana: Heryati Suryantini, Eni Kustanti (Penyunting /Editor), Asep Gumelar, Slamet Sutriswanto (Desain Grafis); Lutfiyanti (Sekretariat).

Redaksi menerima naskah terkait dengan PUSTAKA baik dalam bentuk opini, ulasan berita secara mendalam, informasi IPTEK ataupun gagasan berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan penelaahan. Naskah disajikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer, maksimal 1500 kata di luar gambar dan ilustrasi. Naskah dapat dikirim melalui email : publikasi.pustaka@gmail.com. Warta PUSTAKA tersedia dalam bentuk elektronik dan dapat diakses secara online pada <http://pustaka.setjen.pertanian.go.id/publikasi/warta>.

Alamat Redaksi:
Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122.

Daftar Isi

Cerdaskan Petani : Implementasikan Informasi Pertanian melalui Literasi Tani	1
“ <i>Get Closer with Mustani</i> ”: Sasar Kaum Kreatif dengan Pembuatan Vlog	3
Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, PUSTAKA Cadangkan Anggaran	6
PUSTAKA Susun Tim PPID untuk Mendukung KIP	7
Apresiasi pada Pustakawan Lejitkan Kompetensi Fungsional Pustakawan dengan Apresiasi	10
Selayang Pandang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian	12



Pengantar Redaksi

Salam pembaca,

Menjelang pertengahan tahun 2022, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) mulai mengejar berbagai target capaian kegiatan yang telah direncanakan. Warta PUSTAKA edisi kedua ini, menyajikan informasi terkait berbagai kegiatan PUSTAKA menjelang pertengahan tahun 2022.

Bahasan terkait kegiatan Literasi Tani mengawali informasi di Warta PUSTAKA kali ini. Literasi Tani adalah salah satu upaya meningkatkan kecerdasan petani melalui penyediaan informasi dan pengetahuan. Berbagai topik yang disampaikan dalam Literasi Tani, sebagai upaya mengimplementasikan informasi dan pengetahuan (*text to context*) dalam mengatasi permasalahan pertanian.

Artikel kedua terkait kegiatan di Museum Tanah dan Pertanian (Mustani). Gelaran lomba membuat vlog menjadi daya tarik bagi vlogger-vlogger muda untuk membantu mempromosikan Mustani. Kegiatan ini sebagai upaya menggaet generasi muda agar peduli dengan keberadaan Mustani sebagai media edukasi dan rekreasi.

Berikutnya bahasan terkait dengan pencadangan anggaran kegiatan. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memandang perlu adanya pemangkasan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga yang akan dicadangkan sebagai anggaran belanja negara.

Artikel ke-empat terkait pembentukan Tim PPID Pustaka. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi bagian penting dari suatu organisasi. Pelayanan informasi dapat dilakukan lebih baik jika ada pejabat yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya.

Cerita terkait pembinaan jabatan fungsional pustakawan melalui kegiatan Apresiasi menjadi informasi yang menarik. Apresiasi tahun ini mengambil topik utama terkait ASN Berakhlak dan Uji Kompetensi.

Terakhir artikel terkait pengelolaan karya cetak dan karya rekam, menjadi hal penting untuk dibaca. Ini tentunya terkait dengan fungsi PUSTAKA sebagai pusat deposit di Kementerian Pertanian.

Redaksi berharap, berbagai artikel yang disajikan melalui Warta PUSTAKA dapat berkontribusi dalam peningkatan wawasan dan informasi yang lebih komprehensif terkait berbagai kegiatan yang dilaksanakan PUSTAKA.

Selamat Membaca.

Petani yang cerdas akan menjadi penggerak pembangunan pertanian. Literasi Tani adalah salah satu upaya peningkatan kecerdasan petani melalui penyediaan informasi dan pengetahuan. Informasi yang diberikan tidak sebatas pada teks, tetapi harus dapat meningkatkan pengetahuan dan diimplementasikan dalam konteks untuk memecahkan permasalahan pertanian. Literasi Tani PUSTAKA telah dilakukan di 3 kota di Indonesia.

Cerdaskan Petani Melalui Literasi Tani

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) memberikan layanan informasi pertanian yang berbeda dari yang lain. Layanan ini diberi nama “Literasi Tani”. Literasi sendiri bermakna sebagai kemampuan untuk mengetahui kebutuhan informasi, bagaimana mengakses informasi serta memanfaatkan kembali informasi tersebut untuk menjadi solusi masalah yang dihadapi dan pada akhirnya mampu menunjang kesejahteraan hidup.

Mengadopsi makna literasi tersebut, Literasi Tani hadir menjadi inovasi dalam layanan informasi pertanian. Berdasarkan makna dasarnya bahwa literasi harus menjadi solusi bagi permasalahan, maka Literasi Tani menghadirkan informasi dari *text to context*. Informasi diberikan tidak hanya sekedar bahan dasar dari sebuah sumber informasi (buku, majalah, buletin, video dan sebagainya), namun informasi tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks kebutuhan informasi pengguna. Sebagai contoh pengguna membutuhkan informasi pemupukan, maka dalam konteksnya materi informasi tersebut dapat dipraktikkan langsung oleh pengguna.

Kegiatan Literasi Tani mulai diperkenalkan PUSTAKA pada tahun 2022. Sampai dengan bulan Juni tahun 2022, Literasi Tani telah

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama, pada bulan Maret 2022 dilaksanakan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan topik “Pengendalian Hama secara Terpadu pada Tanaman Padi”. Kedua, bulan Mei 2022 dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo dengan topik “Antisipasi Perubahan Iklim pada Budi Daya Pertanian”. Ketiga, dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Provinsi Lampung dengan topik “Aplikasi Teknologi Budi Daya dan Pascapanen Kopi”.

Kegiatan Literasi Tani utamanya dilakukan di wilayah pendampingan program utama Kementerian Pertanian yang menjadi tanggung jawab PUSTAKA, meliputi Kabupaten Demak, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kegiatan Literasi Tani dapat dilaksanakan dan mendukung kegiatan pembinaan di lokasi pendampingan.

Kegiatan Literasi Tani secara umum diisi dengan tiga agenda utama yaitu pengenalan akses informasi pertanian, pemaparan materi informasi terkait dengan topik yang diangkat serta praktik singkat terkait materi yang disampaikan narasumber. Akses informasi



pertanian yang disosialisasikan utamanya adalah repositori pertanian. Peserta dikenalkan bagaimana mengakses repositori pertanian dan jenis informasi apa saja yang dapat diperoleh.

Topik yang dipilih dalam kegiatan Literasi Tani didasarkan pada kebutuhan pengguna informasi di lokasi terpilih. Sebagai contoh Literasi Tani yang dilakukan di Provinsi Lampung berkaitan dengan pengolahan kopi yang baik. Hal ini karena wilayah ini merupakan salah satu produsen kopi di Indonesia, sehingga petani di sana membutuhkan literasi terkait pasca panen kopi agar menunjang nilai daya saing kopi yang dihasilkan. Pada kegiatan ini peserta mempraktikkan langsung cara pengolahan kopi yang baik di Taman Sains Pertanian Natar, milik Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung.

Peserta kegiatan Literasi Tani umumnya merupakan petani, kelompok tani, kelompok wanita tani dan penyuluh pertanian yang merupakan stakeholder pengguna informasi pertanian di lapangan. Melalui kegiatan Literasi Tani diharapkan pengguna informasi tersebut dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh untuk mengatasi berbagai masalah pertanian di lapangan.

Pada sesi pemaparan materi, dihadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki pengalaman di lapang terkait topik yang disampaikan. Kegiatan Literasi Tani di Kabupaten Demak terkait pengendalian hama padi secara terpadu. Narasumber adalah petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dari wilayah Demak dan Provinsi Jawa

Tengah, yang sekaligus memperagakan beberapa alat untuk pengendalian hama padi. Narasumber literasi pasca panen kopi adalah peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Lampung yang memberikan materi dan praktek langsung menggunakan berbagai peralatan pasca panen kopi.

Melalui berbagai kegiatan literasi tani yang dilakukan tersebut, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna dalam mengatasi berbagai masalah pertanian di lapang. Hal ini tentunya dilakukan untuk mendorong kesejahteraan petani serta mendukung terwujudnya pertanian maju, mandiri, modern.

Eni Kustanti



Narasumber Literasi Tani di Kabupaten Demak Memeragakan Alat Pengendalian Hama Padi secara Terpadu



Praktek pengolahan kopi pada Literasi Tani di TSP Natar, BPTP Lampung



Vlog adalah salah satu media promosi yang efektif terutama bagi kalangan muda/milenial untuk berekspresi. Museum Tanah dan Pertanian (Mustani) melalui ajang “Get Closer with Mustani” mengajak insan-insan muda kreatif untuk berkreasi dan mengenal museum melalui lomba membuat vlog. Diharapkan dengan lomba ini akan muncul vlogger-vlogger muda yang dapat menelurkan konten vlog yang menarik terutama tentang Museum Pertanian (Mustani).

“Get Closer with Mustani”

Sasar Kaum Kreatif dengan Pembuatan Vlog

Salah satu kegiatan Museum Tanah dan Pertanian sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap museum dan dunia pertanian sedari dini. Oleh sebab itu Mustani menyelenggarakan lomba membuat vlog dengan tema “*Get Closer with Mustani*”, yang bertujuan selain untuk mengenalkan Mustani kepada masyarakat juga memberikan wadah khususnya bagi pelajar untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menyalurkan bakat melalui vlog.

Lomba dimulai tanggal 25 Februari sampai dengan 15 April 2022. Antusiasme para pelajar luar biasa, terdapat 29 peserta yang mengirimkan karyanya. Pengumuman lomba dilaksanakan pada tanggal 22 April 2022, bersamaan dengan diselenggarakannya *knowledge sharing* “Bagaimana Membuat Vlog yang Menarik” dengan narasumber Mohammad Kholis yang

merupakan jurnalis dan analis media sosial.

Pemenang lomba dibagi ke dalam dua kategori, yakni 3 video terpilih untuk Kategori Video Terbaik dan 2 video terpilih untuk Kategori Video Favorit. Untuk Kategori Video Terbaik dimenangkan oleh Quincy dan tim (Fransiska dan Vincent) dari BPK Penabur Bogor, Surti Umairoh dan tim (Nadya Nasywa dan Silvia) dari SMK Nurul Qolbi, dan Muhammad Zukri Arsyad serta tim (Ain Delfa dan Aulia Sindi) dari Polbangtan Bogor. Kategori Video Favorit dimenangkan oleh Muhammad Gibran Ibrahim, mahasiswa Universitas Pakuan dan Qitfirul Aziz serta tim (Kharissa Nurmanita dan Hilman Zaydan), mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB).

Video Blog (Vlog)

Vlog merupakan jurnal pribadi berbentuk video dan orang yang membuat vlog ini disebut sebagai *vlogger*. Vlog dapat berisi aktivitas maupun pendapat pribadi dari seseorang. Jenis vlog yang umum ada saat ini adalah: (1) vlog aktivitas, (2) *review/unboxing*, (3) *travel*, (4) kuliner, (5) informasi, dan (6) *lifestyle/beauty*.

Pembuatan vlog tidak akan pernah bisa terlepas dari peralatan/perangkat perekam gambar maupun suara. Perangkat-perangkat ini merupakan hal krusial yang wajib dimiliki. Tanpa adanya perangkat ini, mustahil vlog bisa dibuat.

Perangkat fisik yang diperlukan untuk dapat membuat vlog minimal memiliki: (1) *handphone* dengan kamera, (2) *microphone wireless/clip on*, dan (3) *tripod*.

Peralatan lainnya seperti kamera DLSR, lensa kamera khusus, dan peralatan pencahayaan jika memang ada tentu sangat baik untuk dimanfaatkan dalam pembuatan vlog.

Selain perangkat fisik, *vlogger* juga membutuhkan perangkat non-fisik, yaitu aplikasi *video editor*. Saat ini aplikasi *video editor* banyak tersedia dan dapat diunduh secara bebas. *Vlogger* dapat memilih sesuai dengan keinginannya masing-masing. Untuk *vlogger* yang merasa perlu memiliki kontrol penuh atas semua aspek visual yang ingin ditampilkan dalam video, maka bisa memilih aplikasi *video editor* berbasis komputer/laptop. Bagi *vlogger* dengan mobilitas tinggi dan menginginkan kemudahan dalam pengeditan video, *video editor* berbasis mobile adalah solusinya.

Membuat Konten Vlog

Ketersediaan perangkat tidak serta merta membuat semua orang yang mengambil video

di sana-sini bisa menjadi vlogger yang baik. Masih ada hal yang perlu diperhatikan dengan seksama oleh calon vlogger untuk menghasilkan konten yang baik dan menarik, yaitu:

- Gunakan bahasa sehari-hari / nonformal yang tidak kaku. Hal ini disebabkan konten yang dibuat akan terasa *down to earth* atau lebih dekat dengan penonton, sehingga mempermudah penonton untuk memahami isi vlog.
- Hindari mencantumkan logo instansi dalam vlog terkecuali memang sudah disetujui oleh instansi yang bersangkutan.
- Gunakan aset pendukung konten dengan lisensi domain publik (*public domain*). Biasanya aset ini berupa musik/suara tapi tidak menutup kemungkinan untuk video dan gambar juga diperlukan yang terbuka untuk publik. Dengan aset pendukung berlisensi ini akan membuat konten lebih mudah dibagikan secara legal. Gunakan elemen visual yang bervariasi untuk membuat konten lebih menarik. Misalkan menggunakan transisi yang bervariasi dari suatu scene ke scene yang lain, atau bisa juga menambahkan animasi dan efek lainnya.
- Tidak menutup kemungkinan bagi seorang vlogger membuat konten dengan cara spontan di situasi yang tidak direncanakan dan tanpa perencanaan susunan isi kontennya. Tetapi dengan cara ini, kecil kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Agar bisa maksimal, sebelum membuat vlog lakukan observasi dan buat naskah atau *storyboard* agar vlog yang nanti dibuat dapat teratur dan tersusun secara sistematis. Tidak semua objek dijelaskan sedetail mungkin, hanya ambil yang menarik atau fokuskan pada bagian yang ingin dibuat menarik. Tapi perlu diperhatikan bahwa dalam pembuatan video, aktor dipastikan



Vlog bertema “Get Closer with Mustani”

Knowledge sharing “Bagaimana Membuat Vlog yang Menarik”

tidak terlihat membaca skrip/catatan di dalam vlog.

- Lakukan pengulangan pengambilan gambar lebih dari sekali untuk suatu adegan agar dapat didapatkan gambar video yang terbaik. Belum tentu dalam sekali pengambilan gambar akan langsung didapatkan yang terbaik, jadi perlu ada pengulangan hingga beberapa kali.
- Selalu memperhatikan situasi lingkungan juga merupakan kebiasaan yang diperlukan saat melakukan pengambilan video atau pengambilan suara. Sebagai contoh dalam pengambilan video selalu memilih sudut kamera yang tidak melawan arah cahaya (backlight). Mengambil video melawan arah cahaya akan membuat hasil rekaman video menjadi gelap. Merekam video di tempat yang gelap juga membuat hasil video tidak menarik. Jadi sesuaikan sudut kamera menggunakan cahaya sebagai teman bukan lawan.
- Gunakan setidaknya 6 adegan dalam susunan vlog: (1) pembukaan, (2) hasil akhir, (3) penjelasan awal, (4) penjelasan rinci, (5) hasil akhir, dan (6) penutup. Hasil akhir disisipkan

pada nomor (2) bertujuan untuk menarik perhatian penonton sehingga dengan ekspektasi hasil yang telah diperlihatkan sedikit, penonton akan melihat hasil vlog dari awal hingga akhir video.

Berdasarkan statista.com pada tahun 2021 Youtube merupakan *platform* media sosial yang memiliki pengguna sebesar 2,2 miliar dan Indonesia sebagai pengguna terbesar ketiga dunia. Fenomena ini membuka peluang bagi *vlogger* Indonesia untuk dapat memanfaatkan platform tersebut dan menyajikan konten bermutu bagi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan Museum Tanah dan Pertanian lewat “*Get Closer with Mustani*” telah menjadi salah satu ajang bagi kaum milenial untuk menyalurkan kreativitasnya dengan menjadi *vlogger* dalam rangka turut mendorong kemajuan bangsa Indonesia.

Rima Setiani, Aji Widhi

Pustaka Cadangkan Anggaran Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Pada rapat internal dengan agenda Belanja Subsidi dalam APBN tahun 2022 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2022 beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberi arahan bahwa semua kementerian/ lembaga (K/L) harus melakukan penambahan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) melalui pemangkasan anggaran di seluruh unit kerja. Hal itu disebabkan karena meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik. Langkah ini dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Menindaklanjuti arahan tersebut maka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian/ lembaga (K/L) untuk melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan sumber dari rupiah murni (RM) yang belum direalisasikan/dikontrakkan sebesar Rp. 227,2 triliun.

Diperlukan tambahan pencadangan anggaran pada Belanja Barang dan Belanja Modal yang belum direalisasikan/dikontrakkan sebesar Rp. 24,5 triliun. Penambahan pencadangan dilakukan dari pos anggaran dengan kriteria sumber dana Rupiah Murni (RM), di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional serta belanja modal yang belum dilakukan penandatanganan kontrak.

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) turut mencadangkan

anggarannya sebesar Rp 819.878.000,- dari PAGU anggaran Rp. 15.411.929.000,-. Anggaran ini di ambil dari berbagai sumber kegiatan seperti Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19, Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19, paket meeting, belanja barang operasional dan non operasional, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Modal. Pencadangan anggaran ini tentu akan berdampak pada tidak dapat direalisasinya kegiatan yang anggarannya dicadangkan, sehingga dapat mengganggu target output kegiatan.

Dalam pemblokiran anggaran ini K/L harus mengikuti mekanisme revisi anggaran serta diminta untuk menyampaikan surat usulan penambahan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran), beserta ADK RKA-K/L yang telah diberikan catatan pada halaman IV DIPA.



Apabila sampai batas waktu yang ditentukan, K/L belum menyampaikan usulan tersebut, maka akan dilakukan blokir pada beberapa akun belanja barang secara maksimal pada Satker Pusat melalui sistem (*by system*). Pencadangan anggaran ini akan dievaluasi sampai dengan kondisi perekonomian membaik.

Kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi hingga akhir semester I TA 2022 dan belanja modal serta belanja sosial diharapkan terserap alamiah sampai akhir tahun 2022. Pencadangan anggaran tersebut baru dapat digunakan saat pemerintah merasa tidak akan melakukan *refocusing* dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengatasi pandemi covid-19 ataupun kebutuhan mendesak lain selepas semester I 2022.



Open House di Taman Baca Dramaga

Meski dilakukan pencadangan anggaran seluruh pegawai PUSTAKA tetap semangat bekerja sesuai target sasaran kinerja masing-masing. Hal penting yang harus dilakukan oleh setiap ASN pegawai PUSTAKA adalah bekerja semangat, jujur dan kreatif tanpa melihat anggaran yang tersedia.

Agus Sulaiman, Shinta

Era keterbukaan informasi publik seperti saat ini menuntut sebuah institusi untuk memiliki tim PPID. Apa itu PPID? Apa tugas dan fungsi yang diemban PPID di suatu Kementerian? Yuk kita gali lebih dalam mengenai PPID

Pustaka Susun Tim PPID Untuk Mendukung KIP

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Menjadi suatu kewajiban bagi instansi pemerintah memiliki PPID dengan tujuan untuk dapat melayani kebutuhan informasi sesuai dengan permohonan masyarakat. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) telah menyusun Tim PPID dan berperan sebagai pembantu PPID Utama, yang dapat mendukung keterbukaan informasi publik (KIP).

PUSTAKA bertugas untuk menyiapkan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon II. Selanjutnya menyiapkan bahan klarifikasi informasi publik, bahan saran dan tanggapan atas permohonan keberatan pelayanan informasi publik, serta menyusun laporan secara berkala kepada PPID Utama.

Ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh PUSTAKA untuk mendukung penyediaan pelayanan informasi publik, seperti SK

pembentukan tim PPID, standar operasional pelayanan publik, daftar informasi publik (DIP) berkala, registrasi permohonan informasi publik, daftar informasi publik sesuai peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik, Isian DIP, dan Informasi berkala yang wajib diumumkan setiap enam bulan sekali.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian (Kementan) selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan menciptakan serta menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik.

PPID merupakan amanah undang-undang. Sebagai pertanggungjawaban dalam mengelola informasi dan dokumentasi, setiap tahun badan publik harus melaporkan kinerjanya kepada Presiden yang merupakan salah satu unsur penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Maka dari itu PPID punya kontribusi terhadap peran peningkatan RB di masing masing instansi

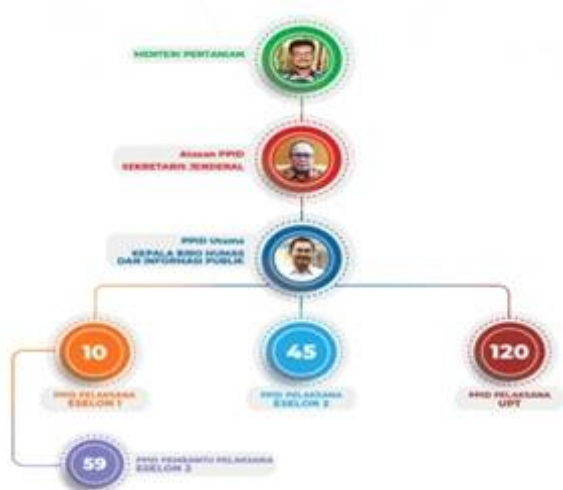
dan unit kerja. Dalam upaya peningkatan kualitas PPID, Pimpinan dan semua unsur harus mendukung, serta perlu adanya komitmen untuk menyediakan anggaran dalam meningkatkan pengelolaan informasi

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kementan dikawal oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/OT.050/A/08/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada masing-masing unit kerja, penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut. Menteri Pertanian menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik sebagai PPID Utama di Kementan. Sebagai PPID Utama Kementan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID utama dibantu oleh PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana Eselon II, PPID Pelaksana UPT, dan PPID Pembantu Pelaksana Eselon II.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 menjadikan setiap institusi publik lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya informasi publik. UU KIP menjadi hukum yang mengikat dimana masyarakat berkesempatan mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan atau institusi publik.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong terciptanya iklim transparansi. Di era informasi yang serba terbuka, kesempatan masyarakat memperoleh informasi semakin tinggi, sehingga diberlakukannya UU KIP menjadikan badan publik mau tidak mau harus mengelola prinsip



good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Tanggung jawab badan publik yaitu terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya UU KIP, maka Kementan selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat dan menciptakan serta menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik.

Dengan disusunnya tim PPID PUSTAKA, diharapkan pengelolaan informasi akan lebih terorganisir dengan baik dan dampaknya publik bisa dengan mudah mengakses layanan informasi



Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2021 sebagai badan publik terbaik.

publik serta menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dhira/Shinta



Lejitkan Kompetensi Fungsional Pustakawan

Pembinaan pustakawan merupakan salah satu program rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA). Tema-tema yang diangkat dalam kegiatan pembinaan terkait dengan hal yang mendukung kompetensi pustakawan sebagai seorang pejabat fungsional khusus. Nama program pembinaan pustakawan ini disebut sebagai Apresiasi. Tentunya ini merupakan salah satu upaya memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan pustakawan.

Tahun 2022 kegiatan Apresiasi mengangkat tema tentang ASN Berakhlak. Tema ini menjadi bagian penting dalam pembinaan pustakawan Kementerian Pertanian (Kementan). Pustakawan Kementan merupakan bagian dari ASN sehingga dituntut dapat menerapkan nilai-nilai ASN Berakhlak dalam pelaksanaan tugasnya. Berakhlak sendiri merupakan akronim dari nilai-nilai dasar yang harus dimiliki seorang ASN yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 15-17 Juni 2022 bertempat di Hotel Aston In Semarang. Dalam rangka mendukung penerapan nilai-nilai ASN Berakhlak tersebut, muatan materi dalam kegiatan ini utamanya terkait dengan penerapan DUPAK

(Daftar Usulan Pengajuan Angka Kredit) online dan uji kompetensi bagi fungsional pustakawan.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 orang pustakawan lingkup Kementerian Pertanian. Narasumber berasal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, serta dari PUSTAKA.

Materi yang disampaikan oleh narasumber yang kompeten dengan tema yang cukup menarik. Pada materi pertama Kepala PUSTAKA, Gunawan membahas profesionalisme pustakawan dengan menekankan pada pentingnya mengoptimalkan butir-butir kegiatan untuk mendukung kinerja organisasi dan berkontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan pertanian.

Materi tentang Sosialisasi Uji Kompetensi untuk Pustakawan yang disampaikan Opong Sumiati, dan Hendra Setiawan dari Perpustakaan Nasional RI memaparkan tuntutan kepada fungsional pustakawan untuk memiliki kompetensi, baik formal maupun non formal. Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Disamping itu, dipaparkan juga bagaimana tata cara uji kompetensi untuk pengangkatan pustakawan pertama kali dan kenaikan jenjang jabatan, dimana setiap jenjang ada kisi-kisinya menggunakan aturan MENPAN RB untuk ujian calon CPNS. Sedangkan uji kompetensi untuk penyetaraan bisa dilaksanakan sendiri atau melalui Perpustakaan Nasional RI.

Materi tata cara penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional pustakawan berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan No. 17 tahun 2021 masih dilakukan dengan tes tertulis. Uji kompetensi diperuntukkan bagi yang akan naik jenjang jabatan, perpindahan jabatan lain, transformasi dari administrator menjadi fungsional, serta alih kategori. Dimana kepesertaan uji kompetensi dapat diikuti oleh peserta yang lolos berkas dan tes tertulis secara online. Materi yang diujikan sebagian besar bersifat teknis dan manajerial.

Materi menarik lainnya adalah terkait dengan mutasi jabatan fungsional, disampaikan

Nurwahida dan Sibli Patriamin Iskak dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Mutasi jabatan fungsional terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional yang terdiri dari inpassing/penyesuaian, pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dan promosi. Semua proses sudah menggunakan aplikasi e-mutasi yaitu aplikasi berbasis web yang menjalankan proses pelayanan mutasi kepegawaian di lingkup Kementan. Dengan adanya aplikasi e-mutasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan mutasi kepegawaian.

Melalui kegiatan pembinaan rutin seperti ini diharapkan akan dapat menjaga *performance* jabatan fungsional pustakawan dan meningkatkan kontribusi positif pustakawan. Pada akhirnya kontribusi pustakawan Kementan dituntut untuk dapat mendukung terwujudnya pertanian maju, mandiri, modern.

Eni Kustanti dan Sigit Sayogya

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian (Permentan No. 30 Tahun 2021) telah disahkan sebagai hasil penyempurnaan dari SK Mentan No. 433 tahun 2003 tentang Pengiriman Publikasi, Dokumentasi dan Informasi Bidang Pertanian. Menjadi kewajiban bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam (KCKR) yang diterbitkannya kepada Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian sebagai koleksi deposit.

Selayang Pandang Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Lingkup Kementerian Pertanian

Perpustakaan Nasional RI menyatakan bahwa karya cetak dan karya rekam memiliki peran penting sebagai salah satu tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional, khususnya di bidang pertanian. Mengingat pentingnya peran tersebut, karya cetak dan karya rekam wajib dikelola dan dilestarikan, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diwariskan secara turun temurun kepada generasi penerus untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut.

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) sesuai tugas dan fungsinya dalam pengelolaan perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian memandang penting penghimpunan karya cetak dan karya rekam lingkup Kementerian Pertanian sebagai koleksi deposit. Pustaka ditetapkan sebagai institusi pengelola KCKR lingkup Kementerian Pertanian sejak tahun 1969 melalui Instruksi Mentan No. 43 tahun 1969, kemudian instruksi tersebut beberapa kali direvisi

yaitu dengan terbitnya SK Mentan No. 873 tahun 1984, SK Mentan No. 433 Tahun 2003, dan terakhir Permentan No. 30 Tahun 2021. Pertimbangan diterbitkannya Permentan No. 30 Tahun 2021 yaitu bahwa karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup Kementan merupakan sumber informasi penting bagi pembangunan pertanian. Karya tersebut harus dijaga agar tetap terpelihara, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif. Selain itu Permentan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan KCKR lingkup Kementan.

Pada dasarnya Permentan No. 30 tahun 2021 berisi tata cara pengelolaan dan penyerahan karya cetak dan karya rekam (KCKR) yang dihasilkan oleh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Permentan No. 30 Tahun 2021 terdiri atas 5 bab. Bab I memuat ketentuan umum mengenai pengertian istilah-istilah penting dalam karya cetak dan karya rekam. Pada bab II diatur mengenai tata cara penyerahan KCKR dimana unit kerja n wajib menyerahkan KCKR kepada Pustaka, dengan ketentuan 2 (dua) eksemplar bagi Karya Cetak atau Karya Rekam Analog; dan/atau 1(satu) salinan rekaman bagi Karya Rekam Digital. Selain itu unit kerja

mengalihmediakan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Analog ke dalam bentuk file digital dan mengunggah file digital ke dalam sistem penghimpunan karya rekam digital Pustaka.

Bab III Permentan No 30 tahun 2021 mengatur mekanisme pengelolaan koleksi deposit yang diselenggarakan oleh Pustaka. Kegiatan pengelolaan koleksi deposit meliputi: penerimaan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan Karya Cetak & Karya Rekam harus dilengkapi dengan : (1) surat tentang wajib serah simpan KCKR yang dikirim melalui surat elektronik dan/atau surat tercetak ke unit kerja lingkup Kementerian Pertanian; (2) unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang menyerahkan KCKR menyerahkan pula surat pengantar yang diserahkan/dikirim ke Pustaka dan Perpustnas RI; dan (3) Pustaka menerima KCKR, menandatangani berita acara serah terima (BAST) dan mengelola koleksi deposit.

Beberapa tata cara pengelolaan terkait administrasi yang dilakukan Pustaka yaitu: (1) Pustaka membuat surat tentang wajib serah simpan KCKR yang dikirim fisik atau email ke unit kerja lingkup Kementerian Pertanian; (2) Unit kerja lingkup Kementerian Pertanian menyiapkan koleksi karya rekam dalam bentuk file yang akan diserahkan, melakukan unggah mandiri, membuat surat

keterangan sudah upload file (template) dan mengirimkan surat elektronik ke Pustaka; (3) Pustaka memeriksa file yang sudah diunggah oleh unit kerja, memverifikasi dan validasi informasi dan dokumen yang diunggah, registrasi koleksi secara elektronis, dan mengelola koleksi deposit.

Hal lain yang diatur dalam Bab III yaitu mengenai pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap bulan untuk menilai kepatuhan unit kerja dalam menyampaikan KCKR kepada Pustaka. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap 6 bulan sekali, sedangkan untuk unit kerja setiap 3 bulan sekali. Unit kerja yang tertib menyerahkan KCKR dapat diberikan penghargaan.

Koleksi deposit perlu dikelola dengan baik menurut sistem tertentu agar koleksi deposit dapat terpelihara dan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemustaka.. Pustaka sedang mempersiapkan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan koleksi deposit sebagai pedoman dalam kegiatan pengelolaan koleksi deposit.

Widaningsih

Bibliotheca Bogoriensis

